



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN 59 (LIMA PULUH SEMBILAN) MADRASAH ALIYAH NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Aliyah Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 59 (lima puluh sembilan) Madrasah Aliyah Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);

4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/663/M.PAN/2/2009 Tanggal 11 Februari 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 59 (LIMAPULUH SEMBILAN) MADRASAH ALIYAH NEGERI.

KESATU : Menetapkan 59 (lima puluh sembilan) Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti kelentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Aliyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI

No	Nama Mahasiswa Hoger	Alamat	Kelurahan	Kantor Departemen Agama Provinsi	Keterangan Asal Mahasiswa
24	MAH Darmaga Utara	Jl. Jend. Sudirman no. 1 Kopoya Selatan Kec. Dumoga Utara	Bolong Mongondow	Suwewa Utara	MA Badrut Ulim Kopoya
25	MAH Pagut	Jl. Sawa no. 73 Bogih Pagut	Pobungo	Gomelo	MA Al-Khotas Pagut
26	MAH Pangsangku	Jln. Trans Sulawesi-Pulu-Pangsangku Kecamatan Pangsangku	Kempu Utara	Buwewa Barat	MA Al-Siddiq
27	MAH Pawa	Jl. Mangga No. 27 Manding, Kec. Pawa	Powewa Mendar	Suwewa Barat	MA Tika MAH Powewa Mendar
28	MAH 15 Jukarto	Jl. Pangasinan AS no. 42	Jakarta Timur	OKI Jakarta	MAH 2 Cincas (Tika)
29	MAH 16 Jukarto	Jl. Raya Karet no. 701 Alur-Kat-Dera-Cengkering	Jakarta Barat	DKI Jakarta	MAH Tegal Alur (Tika)
30	MAH Banjar	Jl. M. DidiKardasasmita no.55 Kec. Banjar	Banjir	Jawa Barat	MAH PGI
31	MAH Cibeurem	Komp. Portes Cibeurem Kec. Cibeurem	Takmalaya	Jawa Barat	MA Mahyar Kiver
32	MAH Cusah	Jl. Iba Garuh no. 24 Cande Kec. Cimati Selatan	Cimati	Jawa Barat	MA Cimati
33	MAH Lab Uli Vogekata	Jl. Lingkar Timur Ds. Prati Bangun Barul	Barul	CA Yogyakarta	MA Lab. Tadjah Uli Yogyakarta
34	MAH Bureno	Jl. Karor no. 626 km.1 Patman Bureno	Bolonoro	Jawa Timur	MA Madhuni Ummi
35	MAH Turan	Jl. Kauman 16 Turan	Mitung	Jawa Timur	MA Madhuni Huda
36	MAH Sumberto	Jl. Raya Tisula no.543 Sumberto	Mitung	Jawa Timur	MA Fasiliah
37	MAH Padangan	Jl. Ds. Soedono no.50 Padangan	Bolonoro	Jawa Timur	MA Sidiyasa Al-Khotirah
38	MAH Kandal	Jl. Raya Kandi no.151	Kandi	Jawa Timur	MA Pustapan Hegeri Kandi
39	MAH Mardoyo	Jl. Denpasar-Gilimanak km.47 Yohi Sureul, Mardoyo	Jakarta	Bali	MA Babul Arifin Mardoyo
40	MAH Seram	Jl. Lulus Seram	Maklu Tengah	Maklu	MA Al-Syiah Masani
41	MAH Wamit	Jl. Aludrah no.1 Wamit	Serau Bag. Timur	Maklu	MA Wamit
42	MAH Bala	Jl. Tumbuh-tumbuh, Bala	Serau Bag. Timur	Maklu	MA BPD Bala
43	MAH Tekuk Bui	Beuregh Lamo Maba Tengah	Hakheza Timur	Maklu Utara	MA Al-Amin Tekuk Bui
44	MAH Kalila	Ds. Burema Kec. Makla	Hakheza Utara	Maklu Utara	MA Bina Insani
45	MAH Wada	Jl. Sawa Ds. Wada	Hakheza Tengah	Maklu Utara	MA S Wada
46	MAH Tisong	Sumpang Tiga Bui	Bakayan	Kahantan Selatan	MA Al-Siddiq
47	MAH Sumpang Kiri	Jl. Panglima Berta Kumpang Bagayoh Kec. Sumpang Kiri	Bakayan	Kahantan Selatan	MA Sumpang Suman
48	MAH Miki	Jl. H. Mudiha Kec. Miki	Kusi Barat	Kahantan Timur	MA Al-Fatih
49	MAH Sumpang Hilir	Gontis Rabi Ds. Gontis Telam Kec. Sumpang Hilir	Sumpang	Kahantan Barat	MA Al-Fatih
50	MAH Sumpang Lodi	Jl. Sijah No. 32 Sumpang Lodi	Bengkayang	Kahantan Barat	MA Yast



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

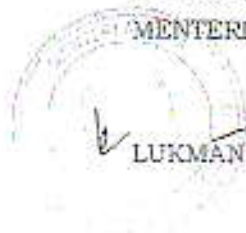
KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

23	Kalimantan Selatan	MAN Kelua	MAN 2 Tabalong
24	Kalimantan Selatan	MAN Pugaan	MAN 3 Tabalong
25	Kalimantan Selatan	MAN Haruai	MAN 4 Tabalong
26	Kalimantan Selatan	MAN Pelaihari	MAN Tanah Laut
27	Kalimantan Selatan	MAN 1 Amuntai	MAN 1 Hulu Sungai Utara
28	Kalimantan Selatan	MAN 2 Amuntai	MAN 2 Hulu Sungai Utara
29	Kalimantan Selatan	MAN 3 Amuntai	MAN 3 Hulu Sungai Utara
30	Kalimantan Selatan	MAN 4 Amuntai	MAN 4 Hulu Sungai Utara
31	Kalimantan Selatan	MAN 5 Amuntai	MAN 5 Hulu Sungai Utara
32	Kalimantan Selatan	MAN 1 Banjarbaru	MAN Kota Banjarbaru
33	Kalimantan Selatan	MAN 1 Tanah Bumbu	MAN Tanah Bumbu
34	Kalimantan Selatan	MAN 2 Paringin	MAN 1 Balangan
35	Kalimantan Selatan	MAN 1 Paringin	MAN 2 Balangan
36	Kalimantan Selatan	MAN Lampihong Kiri	MAN 3 Balangan
37	Kalimantan Selatan	MAN Halong	MAN 4 Balangan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN